

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan bernegara yang semakin terbuka ini, mewajibkan Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif (PP Nomor 56 tahun 2005:158).

Tahun 1999 Pemerintah melakukan reformasi dibidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Darise, 2009:18).

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah serta memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Kemudian dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah akan timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan termasuk dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauhmana instrumen atau Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipasi, dan bertanggung jawab (Darise, 2009: 19).

Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan menyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintah yang baik (Good Governance, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola Keuangan Daerah, dan menyalurkan informasi Keuangan Daerah kepada publik) (Darise, 2009:297).

Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) bisa saja mengalami hambatan akibat ketidak sesuaian penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah seperti diantaranya sumber daya manusia yang kurang ,kapasitas memori dalam server yang kurang cukup, salah penginputan data, salah input kode transaksi, adanya gangguan yang disebabkan terjadinya sistem yang eror, mesin yang bermasalah, serta disebabkan masalah teknis lainnya.

Hambatan atau faktor-faktor yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, masih ada juga masalah yang dihadapi dalam pemerintah kota Gorontalo dimana SIPKD telah diterapkan pada pemerintah kota sejak tahun 2009, dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah kota dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik, namun tidak sesuai dengan yang diharapkan penyusunan laporan pertanggungjawaban masih saja terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sehingga tidak efektifnya dalam pemasukan laporan pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Chabib dan Heru, 2010).

Fenomena yang ditemukan dilapangan yaitu di Pemerintah Kota telah diterapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)

sejak tahun 2009, namun setelah diterapkan masih saja belum efektif penyusunan laporan keuangan misalnya adanya keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, hal ini merupakan kendala pada pemerintah kota, dalam rangka penyusunan laporan keuangannya dengan baik.

Adanya fenomena yang telah diuraikan tentang penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan tersebut, maka penulis ingin meneliti dengan merumuskan judul penelitian “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengidentifikasi masalah terhadap Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo sebagai berikut:

1. Di Pemerintah Kota sejak tahun 2009 telah diterapkan sistem informasi pengelolaan keuangan (SIPKD).
2. Belum efektifnya penyusunan laporan keuangan daerah walaupun sudah diterapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

(SIPKD), dikarenakan masih saja mengalami keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis menentukan perumusan masalah sebagai berikut : Apakah penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas keuangan daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah pada Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

1.5.1 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya terkait dengan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil penelitian ini diharapkan

bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan.